



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

RENCANA KERJA TAHUN 2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda merupakan dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Renja Bappeda Tahun 2023 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023.

Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, sehingga optimalisasi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita dalam melanjutkan pembangunan menuju Sumatera Barat yang lebih baik, maju dan bermartabat.

Padang, 05 Juli 2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,



MEDI ISWANDI, ST, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bappeda	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
III. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023	41
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	45
3.3. Program dan Kegiatan	47
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	62
4.2 Pendanaan	66
V. PENUTUP	67
5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	67
5.2 Rencana Tindak Lanjut	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan. Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Untuk Tahun Anggaran 2023, proses Penyusunan Dokumen Perencanaan sudah harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah dan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun. Dokumen Renja menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menampung program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam KUA PPAS serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 ayat 2, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan yang menjadi Kewenangan Daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Daerah tanggal 8 Februari 2020.

Proses penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 12) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
- 13) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-351-2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

- 14) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bappeda adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan.

Tujuan Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk melaksanakan rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
- b. Sebagai pedoman Pengendalian dan Evaluasi terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Bappeda, proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan Dokumen RKPD dan Renstra Bappeda dan dengan Renja K/L

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bappeda.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Untuk mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2021 Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 23.158.801.521,- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program, 14 kegiatan dan 78 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran yang telah terserap adalah Rp. 22.543.092.512,- atau sebesar 97,34%.

Untuk Belanja Pegawai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp 8.564.518.825,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.473.592.244,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 98,94 %. Untuk Belanja Barang dan Jasa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp 13.573.204.551,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.292.445.268,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 97,93% Untuk Belanja Modal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.021.078.145,00 dengan realisasi Rp 777.055.000,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 76,10 %.

Rincian persentase realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
 Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALI SASI FISIK
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	13.692.041.639	13.491.836.394	98,54	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALI SASI FISIK
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.984.160	386.223.769	99,55	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	317.595.130	317.080.969	99,84	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	7.009.040	6.791.400	96,89	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	7.931.540	7.719.400	97,33	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	7.609.040	7.550.400	99,23	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	7.956.090	7.848.800	98,65	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.846.830	22.497.800	98,47	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.036.490	16.735.000	98,23	100
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.659.209.225	8.566.864.944	98,93	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	8.318.238.825	8.228.752.244	98,92	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	263.204.000	261.144.400	99,22	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.335.000	19.966.400	98,19	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.589.000	9.572.800	99,83	100
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.280.000	10.134.900	98,59	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALI SASI FISIK
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan dan Semester SKPD	37.562.400	37.294.200	99,29	100
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	144.150.176	143.007.646	99,21	100
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	1.837.044	1.835.300	99,91	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	108.400.000	107.283.146	98,97	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD	14.357.132	14.350.200	99,95	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	19.556.000	19.539.000	99,91	100
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.720.032	83.312.550	99,51	100
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65.250.000	64.902.000	99,47	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.566.032	12.520.550	99,64	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	5.904.000	5.890.000	99,76	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.194.214.397	2.118.225.750	96,54	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.919.000	19.914.200	99,98	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	777.030.504	718.704.370	92,49	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALI SASI FISIK
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.718.300	37.492.700	99,40	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305.132.020	292.517.580	95,87	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.622.353	17.622.250	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.501.920	10.500.000	99,98	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	766.290.300	761.474.650	99,37	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	260.000.000	240.000.000	92,31	100
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.771.400	100.979.000	96,38	100
	Pengadaan Mebel	104.771.400	100.979.000	96,38	100
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	100
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.606.274.999	1.590.113.744	98,99	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	7.500.000	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	704.855.000	694.540.939	98,54	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	893.919.999	888.072.805	99,35	100
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	511.717.250	503.108.991	98,32	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	37.271.000	37.088.864	99,51	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALI SASI FISIK
	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.500.000	182.734.127	97,98	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.400.000	72.300.500	97,18	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.736.250	178.606.000	99,93	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	34.810.000	32.379.500	93,02	100
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.549.446.189	2.533.415.648	99,37	100
9.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.365.724.408	1.360.815.026	99,64	100
	Analisa Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	14.828.100	14.755.400	99,51	100
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	58.238.000	57.630.300	98,96	100
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	88.544.000	88.209.100	99,62	100
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	-	-	-	-
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	292.042.400	290.543.800	99,49	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALI SASI FISIK
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	912.071.908	909.676.426	99,74	100
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	394.348.220	392.049.372	99,42	100
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	217.525.950	216.761.372	99,65	100
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	61.615.450	61.218.700	99,36	100
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	47.599.098	47.355.700	99,49	100
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	67.607.722	66.713.600	98,68	100
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	789.373.561	780.551.250	98,88	100
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	90.508.071	86.896.100	96,01	100
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	53.028.090	51.635.050	97,37	100
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	645.837.400	642.020.100	99,41	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALI SASI FISIK
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.917.313.693	6.517.840.470	94,23	97,07
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.627.533.710	1.574.451.740	96,74	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	176.643.250	174.030.443	98,52	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	208.426.000	208.140.900	99,86	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.654.150	6.440.050	96,78	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	46.619.250	45.885.050	98,43	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	312.591.110	288.627.769	92,33	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	522.960.000	503.708.800	96,32	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALI SASI FISIK
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17.566.500	15.914.500	90,60	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	336.073.450	331.704.228	98,70	100
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	985.864.535	977.464.605	99,15	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	185.483.000	182.101.912	98,18	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	210.339.550	210.274.250	99,97	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.636.550	10.513.600	98,84	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	85.163.900	84.603.196	99,34	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	246.671.485	244.766.997	99,23	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALI SASI FISIK
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	215.280.000	213.751.400	99,29	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12.894.000	12.576.900	97,54	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	19.396.050	18.876.350	97,32	100
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4.303.915.448	3.965.924.125	92,15	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	209.539.118	206.909.750	98,75	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	219.500.000	219.078.200	99,81	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	13.599.400	13.196.000	97,03	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.552.003.630	3.224.071.383	90,77	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	194.541.200	190.044.792	97,69	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	REALI SASI FISIK	
	Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	86.313.250	85.114.950	98,61	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8.505.800	8.063.150	94,80	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	19.913.050	19.445.900	97,65	100
	TOTAL	23.158.801.521	22.543.092.512	97,34	100

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 guna pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti dan tidak ada pencapaian yang di bawah 90 %. Dari 73 sub kegiatan hanya terdapat 6 sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 95%. Sub Kegiatan tersebut adalah :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), jumlah anggaran Rp 312.591.110,- terealisasi sebesar Rp 288.627.769,- atau 92,33%.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, jumlah anggaran Rp 17.566.500,- terealisasi sebesar Rp 15.914.500,- atau 90,60%.

3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, jumlah anggaran Rp 3.552.003.630,- terealisasi sebesar Rp 3.224.071.383,- atau 90,77%.
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, jumlah anggaran Rp 8.505.800,- terealisasi sebesar Rp 8.063.150,- atau 94,80%.
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah anggaran Rp 777.030.504,- terealisasi sebesar Rp 718.704.370,- atau 92,49%.
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, jumlah anggaran Rp 34.810.000,- terealisasi sebesar Rp 32.379.500,- atau 93,02%.

Serapan anggaran yang kurang dari 95% pada 6 sub kegiatan diatas disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
2. Efisiensi belanja perjalanan dinas
3. Sisa pengadaan barang dan jasa
4. Sisa belanja jasa pelayanan umum kantor yang disebabkan oleh tinggi standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur
5. Sisa belanja pemeliharaan barang milik daerah yang disebabkan oleh tinggi standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur

Alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 23.158.801.521,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 22.543.092.512,- atau sebesar 97,34% seperti penjelasan diatas digunakan untuk mencapai target akhir Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode Tahun 2016-2021, dengan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1.	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	1.1 Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan : - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra. - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja. - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD. - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS.	100%	100%	100	Sangat tinggi
2.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	2.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72,59)	BB (74,90)	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					100	

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian dari indikator Sasaran Strategis 1 (Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan) adalah dengan predikat sangat baik (100%), dan sasaran strategis 2 (Meningkatkan tata kelola organisasi) dengan predikat sangat baik (100%). Dengan demikian pencapaian indikator sasaran strategis Bappeda secara rata-rata adalah sangat baik (100%).

Dengan telah dilakukannya berbagai perbaikan kinerja dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka pada tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Peringkat I Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. PPD merupakan evaluasi kreatif yang mengikuti kondisi aktual yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam memberikan motivasi sekaligus apresiasi kepada pemerintah daerah yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, dan terukur, serta dapat dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dimana Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bappeda mempunyai fungsi utama yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan yang mejadi kewenangan daerah
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah
- e. Pelaksanaan Administrasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Analisis kinerja pelayanan merupakan analisis terhadap keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda. Pada analisis layanan ini akan digambarkan indikator kinerja berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021 serta Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026.

Sesuai dengan Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, kinerja pelayanan Bappeda diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) indikator kesesuaian antar dokumen perencanaan; dan 2) indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja. Sementara itu, berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021, kinerja pelayanan Bappeda diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu 1) indikator indeks kualitas perencanaan; 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan 3) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi. Berikut pada tabel T-C.30 dapat dilihat gambaran analisis kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra 2016-2021 dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 :

Tabel 2.3 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn 2-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2020 (Thn 2-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	
Renstra 2016-2021 :												
1	Kesesuaian antar dokumen perencanaan : a. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra. b. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja. c. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD d. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	BB	BB	-	-	BB	BB	-	-	
Renstra 2021-2026 :												
1	Indeks Kualitas Perencanaan	-	-	-	-	73	77	-	-	73	77	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	-	78,25	79,25	-	-	78,25	79,25	
3	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	-	-	-	-	83,00	86,00	-	-	83,00	86,00	

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021 dengan indikator kinerja kesesuaian antar dokumen perencanaan yang diukur melalui a) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra; b) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja; c) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD; dan d) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS serta indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja telah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang perencanaan, maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Pemetaan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	Proses tahapan perencanaan belum optimal	Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal
		Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal
	Dokumen perencanaan	Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah	Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan
		Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
		Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan
	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal
		Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal
		Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal
		Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi di bidang perencanaan serta dengan memperhatikan terhadap aspek lain dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang meliputi :

Tabel 2.5
Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Proses Tahapan Perencanaan Belum Optimal a. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal.	Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis,

Permasalahan	Isu Strategis
<p>b. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal.</p>	<p>atas-bawah dan bawah-atas</p>
<p>Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah.</p> <p>a. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal.</p> <p>b. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan.</p> <p>c. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.</p> <p>d. Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal. 2. Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 3. Peningkatan peran BAPPEDA Sumatera Barat sebagai katalisator pembangunan daerah 4. Regulasi terhadap tahapan dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta sistim informasi pembangunan daerah yang belum optimal dari pusat.
<p>Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal.</p> <p>a. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal.</p> <p>b. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal.</p> <p>c. Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal.</p> <p>d. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi untuk Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 2. Dokumen perencanaan dan penganggaran berdasarkan Tematik, Holistik, Integritas, Spasial 3. Optimalisasi hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah termasuk Bappeda. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, Bappeda harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh Bappeda. Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Renja Bappeda Tahun 2023, termasuk indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif. Dalam hal ini, terdapat faktor pendorong kesesuaian antara Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Renja yaitu telah dirumuskannya definisi operasional terhadap IKU, IKD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

Sesuai dengan RKP Tahun 2023 dan Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 bahwa fokus dan tema pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi. Sektor strategis yang dimaksud adalah Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan dan UMKM, serta Sektor Pariwisata.

Sehingga dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor diatas dengan tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi Covid yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hasil analisa kebutuhan pagu anggaran tahun 2023 terhadap pagu Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut :

Tabel 2.6
T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)					
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01				26.148.416.000	PERENCANAAN				26.148.416.000					
5	01	01		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	14.120.383.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	14.120.383.000				
5	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	207.577.050	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	207.577.050				
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	126.979.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	126.979.100	
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 dokumen	19.266.250	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 dokumen	19.266.250	
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	22.316.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	22.316.950	
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	39.014.750	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	39.014.750	

Kodefikasi				Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)		
5	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	9.172.466.307	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	9.172.466.307		
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	100 orang	8.565.966.307	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	100 orang	8.565.966.307	
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	485.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	485.000.000	
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 dokumen	25.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 dokumen	25.000.000	
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	15.000.000	
5	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	3 dokumen	11.500.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	3 dokumen	11.500.000	
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 dokumen	70.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 dokumen	70.000.000	

Kodefikasi				Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)		
5	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	267.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	267.500.000		
5	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	7.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	7.500.000	
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah BMD yang diasuransikan.	11 unit	110.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah BMD yang diasuransikan.	11 unit	110.000.000	
5	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban. - Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya.	2 dokumen 4 orang	110.000.000	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban. - Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya.	2 dokumen 4 orang	110.000.000	
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	4 dokumen	15.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	4 dokumen	15.000.000	
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	4 dokumen	25.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	4 dokumen	25.000.000	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	502.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	502.000.000	
5 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	168 stel	132.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	168 stel	132.000.000	
5 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola. - Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK, dll)	2 dokumen	20.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola. - Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK, dll)	2 dokumen	20.000.000	
5 01 01 1.05 05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	15 orang 84 orang	250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	15 orang 84 orang	250.000.000	
5 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi	4 kali 6 orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi	4 kali 6 orang	50.000.000	
5 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. - Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	6 orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. - Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	6 orang	50.000.000	
5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.621.694.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.621.694.700	
5 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 jenis	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 jenis	15.000.000	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 jenis	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 jenis	250.000.000	
5 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 jenis	55.137.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 jenis	55.137.000	
5 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan. - Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan.	75 jenis 12 kali	345.561.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan. - Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan.	75 jenis 12 kali	345.561.150	
5 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	25.000.000	
5 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	10.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	10.500.000	
5 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah tamu yang dilayani	100 orang	10.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah tamu yang dilayani	100 orang	10.500.000	
5 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 laporan	649.996.550	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 laporan	649.996.550	
5 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan - Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 orang	260.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan - Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 orang	260.000.000	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	277.512.211	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	277.512.211	
5 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	-	-	
5 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Mebel yang diadakan	6 unit	72.512.211	Pengadaan Mebel	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Mebel yang diadakan	6 unit	72.512.211	
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	4 unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	4 unit	200.000.000	
5 01 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Aset Tetap Lainnya baru	1 jenis	5.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Aset Tetap Lainnya baru	1 jenis	5.000.000	
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.574.922.732	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.574.922.732	
5 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	7.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	7.500.000	
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	700 meter kubik 100 mbps 245000 KVA 8 rekening	379.380.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	700 meter kubik 100 mbps 245000 KVA 8 rekening	379.380.000	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	28 orang	1.188.042.732	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	28 orang	1.188.042.732	
5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	496.710.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	496.710.000	
5 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	41.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	41.190.000	
5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	186.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	186.500.000	
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70 Unit	58.220.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70 Unit	58.220.000	
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	185.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	185.800.000	
5 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	48 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	48 Unit	25.000.000	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)			
5 01 02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 persen	4.607.397.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 persen	4.607.397.000			
5 01 02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	2.663.829.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	2.663.829.000			
5 01 02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dokumen	129.429.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dokumen	129.429.000	
5 01 02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	2 dokumen	297.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	2 dokumen	297.000.000	
5 01 02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	178.200.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	178.200.000	
5 01 02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen	79.200.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen	79.200.000	
5 01 02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	594.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	594.000.000	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	1.386.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	1.386.000.000	
5 01 02 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	787.050.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	787.050.000	
5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	193.050.000	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	193.050.000	
5 01 02 1.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dokumen	178.200.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dokumen	178.200.000	
5 01 02 1.02 03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	1 dokumen	168.300.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	1 dokumen	168.300.000	
5 01 02 1.02 04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	247.500.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	247.500.000	

Kodefikasi				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5	01	02	1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	87 persen	1.156.518.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	87 persen	1.156.518.000	
5	01	02	1.03	01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	168.300.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	168.300.000	
5	01	02	1.03	02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	1 Laporan	99.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	1 Laporan	99.000.000	
5	01	02	1.03	03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	176.418.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	176.418.000	
5	01	02	1.03	04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 dokumen	712.800.000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 dokumen	712.800.000	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	60 persen	7.420.636.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	60 persen	7.420.636.000	
5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	2.576.453.200	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	2.576.453.200	
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 dokumen	310.283.400	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 dokumen	310.283.400	
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan	214.725.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan	214.725.500	
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	100.815.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	100.815.500	
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	128.835.300	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	128.835.300	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	534.894.100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	534.894.100	
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 rumusan	598.439.900	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 rumusan	598.439.900	
5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	242.749.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	242.749.500	
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	445.710.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	445.710.000	
5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	1.978.017.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	1.978.017.000	
5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 dokumen	472.396.100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 dokumen	472.396.100	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5 01 03 1.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 rumusan	253.376.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 rumusan	253.376.000	
5 01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	135.672.300	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	135.672.300	
5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	128.835.300	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	128.835.300	
5 01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 dokumen	429.451.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 dokumen	429.451.000	
5 01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 rumusan	257.670.600	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 rumusan	257.670.600	
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	171.780.400	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	171.780.400	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	128.835.300	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	128.835.300	
5 01 03 1.03	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	2.866.165.800	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	2.866.165.800	
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	687.121.600	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	687.121.600	
5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	343.560.800	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	343.560.800	
5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	300.615.700	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	300.615.700	
5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan	72.280.900	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan	72.280.900	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	687.121.600	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	687.121.600	
5 01 03 1.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	3 rumusan	263.481.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	3 rumusan	263.481.000	
5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	214.725.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	214.725.500	
5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	297.258.700	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	297.258.700	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, dalam hal ini usulan yang berupa program dan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat tidak ditemui pada program dan kegiatan yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENJA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian dijabarkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dengan Visi :

**”Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Empat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Disamping mencapai Tujuan Utama, sebagai Strategi dalam melaksanakan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima Arahannya, mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni :
 - a. Pemenuhan Layanan dasar dan Perlindungan Sosial.
 - b. Peningkatan Produktifitas SDM.
 - c. Pembangunan Karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni :
 - a. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - b. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi
 - c. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
 - d. Peningkatan dan Keberlanjutan Akses Energi dan Ketenagalistrikan
 - e. Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni :
 - a. Penerapan pendekatan Omnibus Law yakni Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya.
 - b. Pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun melalui Analisis Dampak Regulasi dan Analisis Biaya dan Manfaat.

4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan focus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni :
 - a. Penyederhanaan Prosedur
 - b. Penyelenggaraan e-Government
 - c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni :
 - a. Industrialisasi
 - b. Pengembangan Destinasi Unggulan
 - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Ada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional untuk Periode RPJMN 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sebagai pelaksana fungsi perencanaan dan pembangunan di Sumatera Barat, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menelaah perubahan-perubahan kebijakan pembangunan nasional yang difokuskan kepada prioritas pembangunan nasional. Rumusan kebijakan tersebut perlu dilakukan melalui telaahan terhadap prioritas nasional dalam RKP Tahun 2023.

Mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2021 dan dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021, maka Tema pembangunan RKP 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan 7 (tujuh) arah kebijakan prioritas, yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Ekonomi hijau
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi

Dengan pertimbangan kondisi makro dan fiskal pada 2022, maka kata kunci dalam RKP pada 2023 diarahkan pada empat hal, yaitu Kemiskinan, Lapangan Kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta Industri.






Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 juga akan melanjutkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional dengan 8 *Major Project* yang berkaitan langsung dengan Tema RKP 2023, yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan dilakukan melalui perbaikan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas SM dilakukan melalui reformasi sistem kesehatan, pendidikan ketrampilan dan vokasi;
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job dilakukan melalui penyediaan lapangan usaha;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan melalui upaya revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM;
5. Revitalisasi industri dan riset terapan dilakukan antara lain melalui industrialisasi dan riset serta inovasi teknologi;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi akan dilakukan melalui upaya ekonomi rendah karbon dan transisi energy;

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar akan dilakukan melalui penyediaan air bersih dan sanitasi serta infrastruktur digital;
8. Pembangunan IKN Nusantara akan berupa fasilitas dasar IKN.

Pemerintah Daerah harus memberikan kontribusi optimal untuk menyusun prioritas pembangunan dan memecahkan isu strategis yang dihadapi, harus memperkuat sinergi lintas sumber pembiayaan, baik Dana Perimbangan dan program prioritas dari kementerian/lembaga guna mendukung prioritas pembangunan,

Tabel 3.1
Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Indikator Makro Pembangunan	Sasaran Awal RKP 2023 (untuk Nasional)	Sasaran Awal RKP 2023 (untuk Provinsi)	Sasaran Provinsi Tahun 2023 (Dalam RPJMD)	Sasaran Awal RKPD 2023
 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30 - 5,90	5,20 - 5,70	4,57	4,57
 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,30 - 6,00	5,43 - 6,18	6,45	6,45
 Tingkat Kemiskinan (%)	7,50 – 8,50	4,65 – 6,00	6,16	6,16
 Indeks Pembangunan Manusia	73,31 – 73,49	73,62 – 73,64	73,23	73,23
 Gini Rasio	0,378 – 0,375	0,296 – 0,295	0,296	0,296

Sumber Data : Olahan Bappenas dengan mempertimbangkan pemulihan akibat pandemic Covid-19

3.2 Tujuan dan Sasaran

Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun ke-3 Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”, dengan indikator tujuan “Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka dapat digambarkan target tujuan dan sasaran Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Target Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2023

Renja Tahun 2023		
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi	26,07
Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	77
Tujuan : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	- Nilai Akuntabilitas Kinerja - Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	79,25 86

Renja Tahun 2023		
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Sasaran :		
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25
2. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	86

Sumber : Renstra Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, maka arah kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2023 sesuai dengan amanah yang dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Forum OPD, Konsultasi Publik serta Musrenbang
2. Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
3. Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai bidang urusan
5. Peningkatan kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah
6. Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
7. Pemanfaatan Data dan Informasi yang Valid, mudah di akses dan Mutakhir berbasiskan Satu Data
8. Peningkatan SDM organisasi
9. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi
10. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi
11. Peningkatan Kualitas Standar Operasional Prosedur yang dipedomani
12. Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab dan ABK yang dipedomani
13. Peningkatan pengelolaan BMD

14. Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan

Selanjutnya, arah kebijakan tersebut akan diimplementasikan melalui penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 didasarkan kepada upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 yang mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Rencana Program tersebut terdiri atas 2 (dua) program perencanaan dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan, dengan potret rencana program pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Rencana program tersebut didukung oleh 14 kegiatan dan 79 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.873.416.000,- sebagaimana terlihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel 3.3 (Tabel T-C.33)
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

Nama OPD : : BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2023				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5 01	PERENCANAAN					28.873.416.000					26.791.082.000
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen	22.985.856.850				100 persen	14.467.428.000
5 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		100%	280.927.050				85%	213.925.950
5 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	129.047.100	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		2 dokumen	133.328.000
5 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	22.148.250	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 dokumen	19.266.250
5 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	90.716.950	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 dokumen	22.316.950
5 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	39.014.750	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 dokumen	39.014.750
5 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	14.313.118.933				100%	9.186.050.890
5 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 orang	13.706.618.933	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		100 orang	8.579.550.890
5 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	22 orang	485.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		22 orang	485.000.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2023				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	109 dokumen	25.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		109 dokumen	25.000.000
5 01 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	15.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		1 dokumen	15.000.000
5 01 01 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	11.500.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		3 dokumen	11.500.000
5 01 01 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	13 dokumen	70.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		13 dokumen	70.000.000
5 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	232.899.500				100%	267.500.000
5 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	7.500.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 dokumen	7.500.000
5 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		- Jumlah BMD yang diasuransikan.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	11 unit	110.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		11 unit	110.000.000
5 01 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD		- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban. - Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen 4 orang	82.768.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		2 dokumen 4 orang	110.000.000
5 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	15.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 dokumen	15.000.000
5 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	17.631.500	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 dokumen	25.000.000
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	502.255.250	APBD			100%	553.000.000
5 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	168 stel	132.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		168 stel	138.000.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2023				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola. - Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK, dll)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen 1 dokumen	20.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		3 dokumen 1 dokumen	20.000.000
5 01 01 1.05 05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	15 orang 84 orang	250.004.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		15 orang 84 orang	275.000.000
5 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 kali 6 orang	50.251.250	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 kali 6 orang	60.000.000
5 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. - Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	6 orang	50.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		6 orang	60.000.000
5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan umum perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.402.039.155				100%	1.661.228.669
5 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	24 jenis	15.004.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		24 jenis	20.000.000
5 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	5 jenis	3.408.500	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		8 jenis	280.033.969
5 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	17 jenis	222.733.690	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		12 jenis	55.137.000
5 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan. - Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	75 jenis 12 kali	218.075.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		75 jenis 12 kali	345.561.150
5 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10 jenis	25.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		10 jenis	25.000.000
5 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	6 jenis	10.500.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		6 jenis	10.500.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2023				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang dilayani	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 orang	10.553.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		130 orang	15.000.000
5 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 laporan	1.636.764.965	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 laporan	649.996.550
5 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan - Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 orang	260.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 orang	260.000.000
5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketersediaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	3.147.389.040				100%	388.629.000
5 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		-	-
5 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diadakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	6 unit	79.350.400	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 unit	83.629.000
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 unit	3.063.038.640	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		6 unit	300.000.000
5 01 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya baru	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 jenis	5.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		1 jenis	5.000.000
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.439.867.922				100%	1.644.922.732
5 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	500 Surat	7.500.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		500 Surat	7.500.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2023				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	700 meter kubik 100 mbps 245000 KVA 8 rekening	223.919.400	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		700 meter kubik 100 mbps 245000 KVA 8 rekening	399.380.000
5 01 01 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	28 orang	1.208.448.522	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		28 orang	1.238.042.732
5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Optimalisasi pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100%	667.360.000				100%	552.170.759
5 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 unit	41.190.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		1 unit	45.000.000
5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10 unit	357.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		10 unit	186.500.000
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	70 Unit	58.370.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		72 Unit	58.220.000
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 unit	185.800.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		1 unit	232.450.759
5 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	48 Unit	25.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		48 Unit	30.000.000
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi		87 persen	1.916.435.000				90 persen	4.720.636.000
5 01 02 1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Optimalisasi Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan		3 dokumen	1.034.062.000				3 dokumen	2.729.951.200

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2023				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 02 1.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	134.111.200
5 01 02 1.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	304.200.000
5 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen Berita Acara	94.950.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen Berita Acara	182.520.000
5 01 02 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	81.120.000
5 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen Berita Acara	400.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen Berita Acara	608.400.000
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	539.112.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	1.419.600.000
5 01 02 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah		4 dokumen	481.577.500				1 dokumen	806.130.000
5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	223.588.500	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	197.730.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2023				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Laporan hasil pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	182.520.000
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	1 dokumen	128.076.500	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	172.380.000
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	129.912.500	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	253.500.000
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan		87 persen	400.795.500				90 persen	1.184.554.800
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	201.862.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	172.380.000
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	101.400.000
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 dokumen	180.694.800

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2023				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	38 dokumen	198.933.500	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		38 dokumen	730.080.000
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD		60 persen	3.971.124.150				70 persen	7.603.018.000
5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		2 dokumen	1.213.059.700				3 dokumen	2.638.751.195
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	194.283.400	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 dokumen	317.785.970
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	21.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	219.917.500
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	100.815.400	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	103.253.245

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2023				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	21.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	131.950.500
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	234.894.100	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 dokumen	547.827.680
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	140.772.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	612.910.000
5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Barat	1 Laporan	100.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	248.619.150
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	400.294.800	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	456.487.150
5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		2 dokumen	1.514.323.350				3 dokumen	2.025.845.015
5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	156.196.100	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 dokumen	483.818.500

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2023				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	38.477.700	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	259.502.650
5 01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	1 Laporan	213.158.800	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	138.952.865
5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	328.835.300	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	131.950.500
5 01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	223.689.850	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 dokumen	439.835.000
5 01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	39.999.900	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	263.901.000
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	1 Laporan	171.780.400	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	175.934.000
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	342.185.300	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	131.950.500

Kodefikasi				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2023				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	1.03	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPDP) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		2 dokumen	1.243.741.100				3 dokumen	2.938.421.790
5	01	03	1.03	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sumatera Barat	2 dokumen	285.121.600	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 dokumen	703.736.000
5	01	03	1.03	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	52.174.600	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	351.868.000
5	01	03	1.03	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	300.615.700	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	307.884.500
5	01	03	1.03	04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	42.280.900	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	79.970.000
5	01	03	1.03	05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Barat	2 dokumen	161.031.600	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 dokumen	703.736.000
5	01	03	1.03	06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	43.828.500	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	269.851.900

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2023				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	Sumatera Barat	1 Laporan	214.725.500	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	219.917.500
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	143.962.700	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	301.457.890
										28.873.416.000					26.791.082.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD

Berdasarkan program tersebut di atas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
PENUNJANG URUSAN	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	6 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	7 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	11 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	12 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	13 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD
	14 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	15 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	16 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	17 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	18 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	19 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	20 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	24 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	25 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	27 Fasilitasi Kunjungan Tamu

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	29	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	30	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	31	Pengadaan Mebel
	32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	33	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	39	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PERENCANAAN		
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	
IX	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	42	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
	43	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
	44	Pelaksanaan Konsultasi Publik
	45	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
	46	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
	47	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
X	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	48	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	49	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
	50	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	51	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
XI	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	52	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
	53	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
	54	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	55	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
C.	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
XII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	56	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	57	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	58	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	59	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
	60	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	61	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	62	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	63	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
	64	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	65	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	66	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	67	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	68	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	69	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	70	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	71	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
XIV		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	72	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	73	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	74	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	75	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	76	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	77	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	78	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	79	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Program/kegiatan/sub kegiatan sesuai peraturan dimaksud dengan 3 Program, 14 Kegiatan dan 79 Sub Kegiatan.

4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dan APBN Tahun Anggaran 2023.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Bappeda Tahun 2023 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023, guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2023.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda serta sebagai acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan Pembangunan dalam kerangka penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparatur Bappeda. Diharapkan semua aparatur dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan ini akan tergambar dalam laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 baik yang bersumber APBD maupun APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RKP, RKPD dan Renstra).
2. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :

- a. Melaksanakan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangan.
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.